



RENCANA KINERJA REVISI I TAHUN 2017

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Pengadilan Agama Balige telah dapat menyelesaikan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.

Sholawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat Manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahakamah Agung RI, Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal perintah untuk melakukan revisi dokumen perjanjian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018, maka disusun revisi rencana kinerja tahun 2017.

Penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2017.

Dalam penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini, Pengadilan Agama Balige masih berpedoman pada DIPA Nomor 005-01.2.401865/2017 tanggal 05 Desember 2016, dan DIPA Nomor 005-04.2.401866/2017 tanggal 05 Desember 2016.

Balige, 29 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE



Muhamad Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.
NIP. 19701210.199203.1.004

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN | 3 |
| BAB III PENUTUP | 8 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Balige adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal perintah untuk melakukan revisi dokumen perjanjian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018, maka disusun revisi rencana kinerja tahun 2017.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Balige dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Strategi 2015 - 2019 Pengadilan Agama Balige sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Agama Balige telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) 2019 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru (*blue print*).

Rencana Kinerja Tahun 2017 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Agama Balige dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai

upaya perbaikan secara berkesinambungan sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Rrevisi I Pengadilan Agama Balige adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BALIGE
TAHUN ANGGARAN 2017

| No | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Anggaran | Ket |
|----|---|-------------------|---|---------|----------|--------------------|----------|-----|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 94% | | | | |
| | | b. | Persentase penyelesaian perkara tepat waktu | 94% | | | | |
| | | c. | Persentase penurunan sisa perkara | 92% | | | | |
| | | d. | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) | 96% | | | | |
| | | e. | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 96% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|-----|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|--------------|
| 2 | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 96% | | | | | |
| | | b. | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 4% | | | | | |
| | | c. | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 96% | | | | | |
| | | d. | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 96% | | | | | |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan | a. | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 96% | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Bantuan Perkara | Pembebasan Biaya | Persentase Penyelesaian Pembebasan Biaya Perkara | Rp 1,800,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|-----|--|--|---|--------------|--|
| | Terpinggirkan | b. | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 96% | | Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan | Persentase Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan | Rp25,000,000 | |
| | | c. | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 96% | | | | | |
| | | d. | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0% | | | | | |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 96% | | | | | |

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

d.t.o

Drs. M. Taufiq H.Z., M.H.I

Balige, 29 Nopember 2017

Ketua Pengadilan Agama Balige



Muhammad Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

BAB III

PENUTUP

Belum optimalnya Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahliannya, menjadi pemicu Pengadilan Agama Balige dalam menyusun Rencana Kinerja dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.